

BAB II
DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA dan PALESTINA
SEBELUM TAHUN 2009

Hubungan antara satu negara dengan negara lain sangat penting artinya dalam rangka menjalin suatu kerjasama, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Sejarah hubungan antara satu negara dengan negara lain merupakan salah satu faktor yang akan mendekatkan negara-negara tersebut. Kedekatan antar negara ini akan sangat penting dalam rangka mencari dukungan apabila suatu negara menghadapi tekanan internasional dan membantu pemulihan ekonomi dalam rangka mencari bantuan ke negara lain.

A. Berdirinya Negara Palestina

1. Berdirinya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)

Pada tahun 1958 tiga tokoh *Fedayeen*, yaitu Yasser Arafat alias Abu Umar, Saleh Khalaf alias Abu Iyad, dan Khalil Al Wazir alias Abu Jihad (terbunuh April 1988) membentuk organisasi Al Fatah, yang kemudian menjadi gerakan *Fedayeen* terbesar dan paling berpengaruh, serta memiliki cabang di beberapa negara Arab. Dalam rangka meningkatkan perjuangan rakyat Palestina, maka pada KTT Liga Arab pertama di Kairo pada bulan Januari 1964 telah dibentuk *Palestine Liberation Organization (PLO)* terdiri dari berbagai kelompok perjuangan rakyat Palestina yang mempunyai strategi perjuangan berbeda dan bersumber pada ideologi dan orientasi politik masing-masing.

Dengan dukungan negara-negara Arab, pada tanggal 2 Juli 1964 terbentuklah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dengan ketuanya Yasser Arafat. Organisasi ini mencakup hampir semua organisasi gerilyawan Palestina dan organisasi massa.¹

2. Cikal-Bakal Proklamasi Kemerdekaan Negara Palestina

Pada tanggal 31 Juli 1988 Raja Hussein dari Yordania mengumumkan keputusannya untuk melepaskan tanggung jawab administratif serta hukum atas wilayah Tepi Barat Sungai Yordan. Keputusan Raja Hussein tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi PLO sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina. Pada bulan Agustus 1988, PLO mengirim delegasi ke Amman guna memberitahukan pemerintah Yordania bahwa PLO akan mengambil alih tanggung jawab atas wilayah yang diduduki Israel dan akan memproklamkan berdirinya Negara Palestina merdeka. Pemerintah Yordania menegaskan akan mendukung langkah yang diambil PLO dan akan mengakui negara yang diproklamkan oleh PLO tersebut.

Pada tanggal 13-14 September 1988, Yasser Arafat dalam pernyataannya di Parlemen Eropa di Strassbourg, Perancis, menyatakan antara lain akan memproklamkan berdirinya Negara Palestina Merdeka yang berbentuk Republik, menganut sistem multi partai, mendukung hak-hak asasi manusia dan memberikan kedudukan sama kepada semua warga negaranya. Arafat juga menyatakan bahwa PLO akan menerima baik Resolusi DK PBB No. 242 dan No. 338.

¹ Harwanto Dahlan, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah Diktat Kuliah*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1995, hal 97

Selanjutnya dalam pertemuan segi tiga antara Arafat dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak dan Raja Hussein di Aqaba tanggal 22 Oktober 1988, telah dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain menyetujui PLO memproklamkan negara Palestina dengan wilayah yang meliputi Tepi Barat (*West Bank*) dan Jalur Gaza (*Gaza Strip*) berdasarkan Resolusi MU PBB No. 181/1947, yang berisikan pembagian negara Palestina menjadi negara Arab, negara Yahudi dan Yerusalem dalam pengawasan internasional.

3. Proklamasi Kemerdekaan Negara Palestina

Sidang Dewan Nasional Palestina (PNC) ke-19 tanggal 12–15 Nopember 1988 di Alger yang disebut *Sidang Intifada*, telah dihadiri oleh 338 dari 448 anggotanya. Tiga fraksi PLO menolak hadir, yaitu SAIQA pimpinan Zuhair Mahsin, PFLP-GC pimpinan Ahmed Gibril dan gerakan pimpinan Abu Musa. Sidang menghasilkan tiga dokumen, yaitu:

- a. *Declaration of Independence*. Dalam deklarasi kemerdekaan ini ada beberapa pokok di dalamnya, yaitu: *Pertama*, Proklamasi berdirinya Negara Palestina di wilayah Palestina dengan Jerussalem sebagai ibukotanya. *Kedua*, Penegasan bahwa Negara Palestina menganut sistem parlementer dimana hak semua warganegaranya dijamin tanpa membedakan agama, ras dan keturunan; Palestina merupakan negara Arab dan terikat pada Piagam Liga Arab; Palestina terikat pada prinsip-prinsip universal mengenai hak-hak asasi manusia, PBB dan Non-Blok; Palestina menganut prinsip hidup berdampingan secara damai dan menghendaki penyelesaian konflik melalui cara-cara damai.

- b. *Proclamation of the Constitution of the State of Palestine Provisional Government*. Isi dalam proklamasi ini antara lain menegaskan bahwa : Pemerintah Sementara Negara Palestina akan dibentuk secepat mungkin; Pemerintah Sementara akan terdiri dari para pemimpin Palestina yang berada di dalam maupun di luar daerah pendudukan; Komite Eksekutif PLO memegang wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Sementara tersebut.
- c. *Political Communique*. Dalam Komunike Politik ini beberapa hal di dalamnya adalah: menegaskan bahwa intifadha akan diteruskan dan ditingkatkan; menegaskan tekad PLO untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel melalui Konferensi Perdamaian Internasional tentang Timur Tengah yang didasarkan pada Resolusi DK PBB No. 242 dan No. 338; menyerukan penarikan mundur Israel dari semua wilayah yang diduduki sejak tahun 1967; menghendaki agar wilayah yang diduduki Israel ditempatkan di bawah pengawasan PBB; menegaskan penolakan terhadap terorisme dalam segala bentuknya.

4. Reaksi Dunia Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Negara Palestina

Dengan adanya sidang Dewan Nasional Palestina (PNC) yang menghasilkan tiga keputusan penting yang merupakan awal dari proklamasi negara Palestina, maka berbagai reaksi dikeluarkan oleh berbagai negara. Negara-negara yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam konflik Israel-Palestina tentu saja menolak berdirinya negara Palestina. Sedangkan negara-

negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, menyatakan dukungannya terhadap berdirinya negara Palestina yang merdeka.

Negara-negara yang secara tegas menolak proklamasi negara Palestina adalah Amerika Serikat, Israel, dan Iran, namun dengan alasan yang berbeda. Alasan penolakan AS adalah karena keputusan Sidang Dewan Nasional Palestina (PNC) dianggap sebagai tindakan sepihak. Sedangkan alasan penolakan Israel adalah Israel menganggap wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza dan Jerusalem adalah wilayah kekuasaannya.

Sementara itu, Iran menyatakan penolakannya terhadap proklamasi kemerdekaan Palestina tersebut karena Iran tidak rela menyerah kepada Israel. Negara-negara sosialis pada umumnya mengakui dan mendukung negara Palestina yang diproklamkan tanggal 15 Nopember 1988 itu. Sedangkan negara-negara Blok Barat pada umumnya menyambut baik penerimaan PLO terhadap Resolusi DK PBB No. 242 dan No. 338, tetapi tidak mengakui negara Palestina karena negara Palestina tidak memenuhi ketentuan-ketentuan internasional.

B. Dukungan Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina

Indonesia sebagai negara yang anti penjajahan mendukung gerakan bangsa Palestina untuk merdeka. Oleh karena itu, maka kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina, bahkan bersama negara-negara lain dalam kemitraan strategis, adalah salah satu sikap Indonesia yang nyata dalam membantu negara lain. Dalam masalah ini, sumbangan pemerintah Indonesia

dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina adalah politik luar negeri Indonesia yang dibuat berdasarkan nilai, sikap, yang mencerminkan kepentingan nasional.

Sejak lama Indonesia telah menentang penjajahan Israel terhadap Palestina. Setahun sebelum kemerdekaan negara Israel Raya, Indonesia juga menegaskan dalam Radio Republik Indonesia (RRI) di Yogyakarta. Dalam ulasan berita yang disiarkan oleh Ikhwanul Muslimin Mesir terkait dengan Indonesia-Palestina, pada tanggal 3 Oktober 1947, menyatakan bahwa: *“Indonesia menentang pembagian Palestina antara penduduk asli Arab dan pendatang Yahudi, sebagai disarankan oleh komisi internasional PBB, serta mengancam pendirian komisi itu yang dikatakan tidak berpedoman kepada kenyataan yang hidup di Palestina dan tidak menghiraukan keadilan dan kebenaran...Persoalan Palestina pada dasarnya adalah persoalan kebenaran, keadilan dan kemerdekaan. Maka oleh karena itu, ia menjadi persoalan Arab dan Kaum Muslimin seluruhnya. Bangsa Indonesia yang sedang memerangi kezaliman dan penjajahan menentang sekuat-kuatnya pembagian Palestina dan berdiri di samping saudara-saudaranya negara Arab dan Umat Islam dan pecinta-pecinta kebenaran dan keadilan, sampai Palestina mencapai kemerdekaan penuh dan memperoleh hak-haknya seluruhnya.”* 2

Dari kutipan ini kita bisa melihat bahwa Indonesia punya perhatian khusus kepada masalah yang terjadi di Palestina. Indonesia sebagai negara yang anti penjajahan, turut prihatin, olehnya itu berupaya keras agar masalah Palestina bisa terselesaikan dengan segera, walaupun sampai saat ini kemerdekaan penuh bangsa Palestina belum juga diraih. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi kunjungan timbal balik antara pejabat Indonesia dengan pejabat Palestina, juga sebaliknya. Pada 16–18 Maret 1990, Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas, menemui Presiden

2 M. Zein Hassan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hal. 279

Palestina, Yasser Arafat di Tunis, Tunisia dan pada 2002 Menteri Luar Negeri RI, Nur Hassan Wirajuda, bersama-sama Menteri Luar Negeri Negara-Negara Komite Palestina berkunjung ke Palestina. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama pejabat tinggi Indonesia ke Palestina. Sementara itu kunjungan dari pihak Palestina, akan dipaparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel II

Kronologis Kunjungan Wakil Palestina ke Indonesia

No.	Waktu	Kegiatan
1.	Juli 1984	Ketua PLO Yasser Arafat, dalam rangka menjajagi kemungkinan Pemerintah RI memberikan izin pembukaan kantor PLO di Jakarta.
2.	Juli 1987	Utusan Khusus Ketua PLO Dr. Sami Mussalam, dengan tujuan membicarakan kembali masalah pembukaan Kantor Perwakilan PLO.
3.	Desember 1987	Utusan Khusus Yasser Arafat, Dr. Sami Mussalam, dalam rangka permintaan Palestina membuka Kedutaan Besar di Jakarta.
4.	Mei 1998	Ketua Departemen Politik/menlu PLO Farouq Kaddoumi, dalam rangka pembukaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.
5.	Januari 1989	Peninjau Tetap Palestina untuk PBB Dubes Zehdi Labib Terzi (sebagai Utusan Khusus Yasser Arafat), untuk membicarakan rencana pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Palestina di Jakarta.
6.	18–22 Oktober 1989	Menlu Palestina Farouq Kaddoumi dalam rangka penandatanganan “Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik Palestina-RI Tingkat Duta Besar” dengan Menlu RI Ali Alatas tanggal 19 Oktober 1989, dan pembukaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta juga pada tanggal 19 Oktober 1989.
7.	Februari 1991	Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi, dengan maksud menjelaskan mengenai perkembangan terakhir masalah Palestina dan Perang Teluk.
8.	14–15 Mei 1992	Menlu Palestina, Farouq Kaddoumi sebagai Ketua Delegasi untuk KTM Biro Koordinasi Non-Blok di Bali.

9.	1–6 September 1992	Presiden Palestina, Yasser Arafat sebagai Ketua Delegasi untuk KTT Non-Blok ke-10 di Jakarta.
10.	24-25 September 1993	Presiden Palestina/Ketua Komite Eksekutif PLO, Yasser Arafat, untuk menyampaikan kepada Presiden RI perkembangan terakhir proses perdamaian Timur Tengah, khususnya mengenai Persetujuan PLO-Israel tanggal 13 September 1993; dan menjelaskan rencana selanjutnya mengenai wilayah Palestina, khususnya di wilayah-wilayah otonomi yang akan didirikan.
11.	16 Nopember 1993	Presiden Yasser Arafat menemui Presiden RI, dalam kunjungannya di Tunis untuk menerima secara langsung (sebagian) bantuan dari Pemerintah Indonesia untuk pembangunan kembali wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.
12.	22 April 2005	Wakil Perdana Menteri Palestina, Mr. Nabil Shaath, menghadiri KTT Asia Afrika di Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Presiden RI di sela-sela acara konferensi tersebut.
13.	21 April 2006	Dr. Nabil Shaath (anggota Parlemen Palestina), dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Palestina, bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan surat dari Presiden Mahmoud Abbas, yang isinya meminta dukungan dan bantuan Indonesia bagi Palestina dalam menghadapi krisis keuangan dan tindakan agresif Israel pasca kemenangan Hamas dalam Pemilu Palestina 25 Januari 2006.
14.	25–26 Mei 2006	Menteri Luar Negeri Palestina, Mahmoud al-Zahar melakukan kunjungan kerja ke Indonesia sebagai awal rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara Asia.
15.	2 Agustus 2007	Kunjungan Utusan Khusus Presiden Palestina, Nabeel Saat bertemu Presiden RI dalam rangka menyampaikan pesan dari Presiden Palestina dan menyampaikan hasil pertemuan sebelumnya antara Presiden Palestina dengan Presiden Rusia. Kunjungan tersebut dilakukan oleh karena terkait dengan rencana kunjungan Presiden Rusia ke Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2007.
16.	21-23 Oktober 2007	Presiden Palestina telah melakukan kunjungan kenegaraannya yang pertama ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan salah satu rangkaian kunjungan Presiden Abbas ke tiga negara Asia Tenggara, antara lain Malaysia, Indonesia dan Brunei.

Indonesia, dalam mendukung kemerdekaan penuh Palestina, juga memberikan bantuan. Beberapa bantuan tersebut ada yang bersifat kenegaraan, lewat lembaga internasional, juga banyak bantuan kelembagaan ormas Islam diantaranya adalah Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA).

Melalui sebuah lembaga Internasional UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East*), Indonesia juga telah secara teratur memberikan bantuan reguler sebesar US\$ 8.000,- setiap tahunnya. Sumbangan tersebut mulai tahun 1994 ditingkatkan jumlahnya menjadi US\$ 25.000. Disamping itu, untuk membantu meringankan penderitaan hampir dua juta rakyat Palestina yang berdiam di wilayah pendudukan Israel, pemerintah RI pada bulan Juni 1991 telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan seperti beras, gula, susu bubuk, dan jenis makanan lainnya kepada Palestina, yang penyerahannya dilakukan melalui UNRWA.

Sedangkan, bantuan Bantuan Pemerintah RI kepada Pemerintah Palestina sesuai pembicaraan Presiden RI dengan Presiden Yasser Arafat tanggal 24 September 1993 di Jakarta mengenai bantuan keuangan Pemerintah RI kepada rakyat Palestina sebesar US\$ 5 juta, seperti yang telah dinyatakan dalam Konferensi Negara-negara Donor di Washington, D.C. tanggal 25 September 1993, Presiden Soeharto telah menyerahkan bantuan tahap pertama sebesar US\$ 2 juta kepada Presiden Arafat pada tanggal 16 Nopember 1993 di Tunis, Tunisia, dalam kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Tunisia (15-17 Nopember 1993).

Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 1994 Presiden RI telah menyetujui untuk memberikan lagi USD 1 juta kepada Presiden Arafat sebagai sumbangan tahap ke-2 (dari janji bantuan sejumlah US\$ 5 juta) Pemerintah RI bagi pembangunan Palestina.

Bantuan lainnya yang diberikan Pemerintah RI adalah lewat Bantuan Biaya Operasional Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Sejak dibukanya Kantor Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada tahun 1989, Pemerintah RI senantiasa memberikan bantuan kepada Kedutaan Besar Palestina, yang berupa fasilitas gedung Kantor yang terletak di Jl. Diponegoro No. 59, Jakarta Pusat, biaya pemeliharaan gedung dan biaya operasional lainnya. Jumlah bantuan yang diberikan berubah-ubah, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain sumbangan-sumbangan resmi Pemerintah RI tersebut, terdapat pula sumbangan-sumbangan yang bersifat pribadi atau dari kelompok-kelompok Muslim di Indonesia.

C. Peranan Indonesia terhadap Palestina

Perdamaian Timur Tengah, memiliki banyak arti bagi hubungan Indonesia-Palestina. Sayangnya, nilai penting Indonesia itu tidak banyak mengubah kebijakan Indonesia dalam penyelesaian masalah Palestina. Penyebab utama kemandulan Indonesia adalah adanya benturan permanen antara publik (terutama Islam) dan pemerintah dalam identifikasi identitas kebijakan kita terhadap Palestina (dan Timur Tengah serta dunia Islam secara umum). Perbedaan yang tercipta antara bahasa publik dan bahasa pemerintah itu menjadi hambatan utama

dalam perumusan kebijakan yang lebih tegas dalam penyelesaian masalah Palestina. Hasilnya, apa pun klaim dan penjelasan pemerintah dalam berbagai keputusan yang terkait Palestina, tidak akan mampu memuaskan tekanan publik (Islam). Dari sini muncul efek lanjutan dalam perumusan peran Indonesia dalam proses perdamaian. Indonesia menjadi terhambat untuk berperan sebagai mediator, mengingat syarat utama mediator adalah mengakui keberadaan Israel dan memiliki kontak dengan mereka agar bisa menjadi penyampai pesan yang baik. Isu ini terlalu sensitif di dalam negeri dan akan mengganjal kabinet mana pun dalam upaya menjadi salah satu pemain utama di dalam proses perdamaian. Lebih buruk, terkait kebutuhan itu, pemerintah tidak menjalankan mekanisme pembelajaran publik yang terencana. Akibatnya, jargon menjadi jembatan menjadi tidak bermakna saat dihadapkan pada penyelesaian masalah Palestina-Israel.

Di luar proses penyelesaian konflik Palestina-Israel, alternatif yang bisa dibidik Indonesia adalah menjembatani dialog intra-Palestina, antara Hamas-Fatah. Ide ini sempat mengemuka menjelang penandatanganan Kesepakatan Mekkah (2007), tetapi kemudian tidak lagi terdengar. Konflik intra-Palestina ditandai hadirnya masalah politik (kekuasaan) yang tumpang tindih dengan masalah kultur permusuhan antarklan. Masih kuatnya tradisi tribalisme yang bernuansa kekerasan di Palestina membutuhkan perlakuan khusus dalam penyelesaian masalah. Upaya Mesir selama bertahun-tahun dalam menjembatani perbedaan Hamas-Fatah (serta faksi-faksi lainnya) menemui titik puncak dalam penandatanganan Dokumen Kairo (2005) yang berisi kesepakatan gencatan senjata yang menjadi prasyarat pemilu pasca-Arafat. Langkah Arab Saudi (Kesepakatan

Mekkah, 2007) menemukan hasil dengan kompensasi dana bantuan bagi krisis internal dan pembentukan kabinet persatuan. Dua catatan dialog intra-Palestina itu menunjukkan, sengketa politik bisa dijumpai dengan berbagai pilihan, mulai dari implementasi demokrasi, pembagian kekuasaan, hingga pembagian sumber finansial.

Yang menjadi pekerjaan rumah adalah pencarian penyelesaian masalah kultur kekerasan antarkelompok. Berkaca pada diri sendiri, Indonesia bisa merumuskan bagaimana mengelola keragaman dan kekerasan antarkelompok untuk menciptakan masyarakat yang stabil. Ide Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki Indonesia bisa dijadikan model bagi penyelesaian masalah di Palestina. Menemukan kembali ide yang lebih mendasar, Islam-nya Hamas atau nasionalisme sekuler-nya Fatah, bukan sesuatu yang mustahil. Jika Arafat mampu menyatukan semua faksi perlawanan Palestina (1969), dengan semua dominasinya, mengapa menjembatani kelompok Islamis dan Nasionalis tidak bisa dilakukan. Selain itu, perbaikan ekonomi bisa menjadi salah satu pilihan bagi pintu masuk untuk menjembatani Hamas dan Fatah. Pengalaman Indonesia menjadi bintang baru Asia pasca kebangkrutan di pertengahan tahun 1960-an bisa ditularkan ke Palestina, tentunya dengan modifikasi secukupnya. Keberhasilan Indonesia, meski banyak yang menentang istilah keberhasilan ini, untuk keluar dari krisis ekonomi tahun 1997 sekaligus menciptakan sistem politik yang lebih stabil bisa menginspirasi Palestina untuk keluar dari ancaman kebangkrutan dan perpecahan.

Beragam ide itu semakin dimungkinkan dengan adanya penerimaan kedua faksi terhadap keterlibatan Indonesia. Masuknya Indonesia ke dalam penyelesaian masalah ini tidak akan menimbulkan gejolak luar biasa bagi negara-negara Arab. Indonesia bisa berbagi peran dengan negara-negara Arab dalam membuka jalan dialog, misalnya dengan Saudi dan rezim-rezim Teluk untuk berbagi beban finansial. Penolakan dari Eropa dan AS pun tidak akan terlalu kuat, apalagi di tengah upaya mereka mendekati negara "Islam moderat" seperti Indonesia. Meski menentang kehadiran Hamas dalam pemerintahan, AS tidak mempermasalahkan upaya rekonsiliasi Palestina selama hasilnya mendukung perdamaian. Masalah utama, kembali, terletak pada kemauan pemerintah dalam mendefinisikan peran Indonesia dalam proses perdamaian Timur Tengah. Jika melihat sedemikian kuatnya kampanye pemerintah Yudhoyono dan Deplu untuk berkomitmen dalam proses perdamaian, seharusnya Indonesia tidak akan ragu lagi untuk masuk dalam penyelesaian masalah Palestina. Apalagi pendulum suara publik (Islam) saat ini juga sedang mengarah ke sana. Kedekatan yang sudah dibangun Deplu dengan para ulama dan akademisi Islam belakangan ini, akan bisa bermanfaat dalam mengarahkan suara publik untuk lebih mendukung pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya di Palestina.

D. Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia Palestina

Pada tanggal 16 Nopember 1988 Indonesia secara resmi menyambut baik dan mendukung keputusan PNC yang telah memproklamkan pembentukan Negara Palestina merdeka tanggal 15 Nopember 1988 di Alger, Aljazair.

Keputusan Pemerintah RI untuk mengakui Negara Palestina merdeka sejalan dengan dukungan Indonesia yang konsisten selama ini kepada perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh keadilan dalam memulihkan hak-haknya yang sah maupun dalam menentukan nasib sendiri termasuk mendirikan negara merdeka di tanah Palestina.

Sebagai tindak lanjut pengakuan Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Negara Palestina dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, maka pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani “*Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Palestina Tingkat Duta Besar*” antara Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Palestina Farouq Kaddoumi. Pada hari itu juga Menlu Palestina membuka Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Duta Besar Palestina pertama untuk Indonesia telah menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Soeharto pada tanggal 23 April 1990. Sebaliknya, Indonesia menunjuk Duta Besar RI di Tunis untuk diakreditasikan juga bagi Negara Palestina. Sejak tanggal 1 Juni 2004 akreditasi Palestina berada di bawah rangkaian KBRI Yordania.

Hubungan politik RI-Palestina terus berjalan baik selama ini. Indonesia, sebagai pengejawantahan amanat Pembukaan UUD 1945, telah mengambil kebijakan dasar untuk secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dengan mengacu kepada berbagai resolusi yang dikeluarkan PBB, khususnya yang menyangkut hak-hak Palestina untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Indonesia secara konsisten menegaskan dukungan tersebut dalam berbagai kesempatan dan forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

E. Kerjasama Indonesia dan Palestina

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Palestina telah lama terjalin. Kerjasama ini meliputi berbagai bidang, diantaranya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik.

Pada 14-15 Juli 2008, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Afrika Selatan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika untuk Pembangunan Kapasitas Palestina (*New Asian African Strategic Partnership/NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine*). Pertemuan ini dihadiri delegasi dari 53 negara Asia dan Afrika, tiga negara Amerika Latin (Brazil, Venezuela, dan Chile), serta tiga organisasi internasional. Tujuan utama penyelenggaraan konferensi tersebut adalah untuk mengidentifikasi berbagai proyek pembangunan kapasitas yang praktis dan memungkinkan dalam rangka menyiapkan rakyat Palestina saat kemerdekaannya. Bentuk kerjasama dan bantuan teknik dari negara-negara di kawasan Asia-Afrika tersebut khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan (di sektor-sektor pelayanan, administrasi publik, keuangan publik, konstruksi, pertanian, kesehatan, pendidikan, Usaha Kecil dan Menengah/UKM, pelatihan kepolisian), penguatan institusi dan aparatur pemerintahan, pembangunan infrastruktur perdagangan, dan investasi.

Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti program Kemitraan Strategis Baru dari Negara-Negara Asia – Afrika (*New Asia – Africa Strategic Partnership/NAASP*) yang dihasilkan pada KTT Asia – Afrika tanggal 22 – 23 April 2005 di Jakarta. Salah satu butir dalam deklarasinya yang

ditandatangani oleh 107 kepala negara ditegaskan dukungan terhadap Palestina untuk memperoleh kedaulatan. Dukungan ini ditegaskan kembali dalam Rencana Aksi Kemitraan Strategis Baru dari Negara-Negara Asia – Afrika (*New Asian-African Strategic Partnership Plan of Action*) yang menyatakan perlunya tindakan nyata untuk mendukung penyelesaian damai terhadap masalah Palestina dan pada saat bersamaan menjamin kesiapan bangsa Palestina ketika mereka memulai pembangunannya.

Dalam *New Asian African Strategic Partnership (NAASP) Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* tanggal 14 Juli 2008, Indonesia telah memberikan komitmen berupa bantuan kerjasama teknik berupa pelatihan bagi 1.000 peserta Palestina dalam periode 2008 – 2013 yang akan dilaksanakan oleh berbagai instansi termasuk sektor swasta. Sebagai langkah awal dari bukti komitmen Pemerintah Indonesia tersebut, tanggal 10 Juli – 22 Agustus 2008 Deplu telah menyelenggarakan program pelatihan diplomatik bagi 10 orang diplomat Palestina. Kegiatan ini merupakan implementasi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan oleh Menlu RI Hasan Wirajuda dan Menlu Palestina, Dr Riad Al Maliki di Istana Negara, Jakarta, pada 22 Oktober 2007 lalu, yang disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dalam pertemuan ini telah ditanda tangani lima Nota Kesepahaman, antara lain, MoU Konsultasi antara Pemerintah RI dan Palestina, MoUKerjasama Teknis Pembangunan SDM, MoU Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik,

MoU Kerjasama Pertukaran Berita, MoU Kerjasama Sister City antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Ibukota Al-Quds As-Shareef.

Termasuk dalam kegiatan ini, yang merupakan bentuk kerja sama teknis (technical cooperation) berupa peningkatan kapasitas (capacity building), adalah magang di beberapa unit Deplu selama seminggu, khususnya mengenai protokol dan perlindungan warga, lalu program kebudayaan dan mengenali sistem sosial di Indonesia dengan kunjungan ke Yogyakarta. Program yang kalau ditotal berlangsung selama satu setengah bulan dan hanya diikuti 10 orang ini tidak akan banyak pengaruhnya bagi persiapan sebuah (nantinya) negara baru bernama Palestina, sehingga harus merupakan sebuah gerakan bersama bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk mewujudkan dukungan ini.